BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Banjar berada di Kecamatan Martapura. Secara geografis, Kabupaten Banjar berada pada koordinat 114° 30' 20" hingga 115° 33' 37" Bujur Timur dan 2° 49' 55" hingga 3° 43' 38" Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 4.668,50 km² atau sekitar 12,20% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa, dan 13 Kelurahan, dari 20 Kecamatan tersebut, terdapat 19 Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan sebagai lembaga pemerintah yang menaungi urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan dan penyelesaian masalah pernikahan di masyarakat.

Kabupaten Banjar memiliki 19 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di berbagai Kecamatan, yaitu di Kecamatan Aluh-Aluh, Aranio, Astambul, Beruntung Baru, Gambut, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura Kota, Martapura Timur, Mataraman, Pengaron, Paramasan, Sambung Makmur, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Simpang Empat, Tatah Makmur, dan Telaga Bauntung.⁸³

⁸³ Arih Dwi Prasetyo, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025*, h. 3-19.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada enam Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar, yaitu KUA Kecamatan Astambul, KUA Kecamatan Gambut, KUA Kecamatan Karang Intan, KUA Kecamatan Martapura, KUA Kecamatan Mataraman, dan KUA Kecamatan Simpang Empat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses, keterwakilan wilayah, serta keragaman karakteristik kasus nikah siri yang terjadi di masing-masing kecamatan. Keenam kecamatan ini memiliki latar sosial, budaya, dan tingkat literasi hukum yang berbeda-beda, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi pola penyelesaian nikah siri di Kabupaten Banjar.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pencatatan perkawinan, KUA di Kabupaten Banjar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial dan keagamaan yang strategis. KUA menjadi ujung tombak dalam upaya penegakan aturan perkawinan sekaligus pusat konsultasi bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan rumah tangga, termasuk kasus nikah siri yang masih marak terjadi. Posisi ini menjadikan KUA sebagai institusi yang memiliki peran ganda, yakni memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga keselarasan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, menggali perspektif kepala KUA di wilayah ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana penyelesaian hukum nikah siri dilakukan, serta bagaimana upaya penyalarsan antara prinsip kepastian hukum dan kemaslahatan syariah dapat diimplementasikan di tingkat lokal.

B. Mekanisme Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Nikah Siri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar

1. KUA Kecamatan Astambul

Identitas Informan 1

Nama Lengkap : H. Hasan Yamani, S.Ag.
Tempat & Tanggal Lahir : Sungai Alat Kabupaten Banjar, 17-12-1971
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan & Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Astambul
Alamat : JL. A. Yani Antasan Senor RT.06 RW.03
Kecamatan Martapura Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Hasan Yamani, S.Ag., selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, diketahui bahwa praktik pernikahan siri masih cukup sering terjadi di wilayahnya. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab umum yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri. Pertama, karena calon mempelai masih di bawah umur, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, status hukum pasangan yang tidak jelas, misalnya sudah pernah menikah secara resmi namun belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga saat hendak menikah kembali, mereka memilih jalan nikah siri. Ketiga, tekanan dari orang tua yang merasa proses administrasi pernikahan terlalu rumit, ditambah adanya ketidaksesuaian data pada dokumen calon pengantin seperti akta kelahiran, KTP, KK, dan ijazah,

sehingga mendorong mereka untuk memilih jalur nikah tidak tercatat atau nikah siri. Keempat, faktor jarak dan waktu, di mana lokasi KUA cukup jauh dari tempat tinggal calon pengantin, serta keterbatasan waktu karena pekerjaan. Bahkan ada pasangan yang memilih menikah siri karena alasan pribadi, seperti merasa lebih praktis atau nyaman tanpa harus mengikuti prosedur resmi negara.

Dalam menghadapi kasus-kasus nikah siri, KUA Astambul memiliki prosedur tertentu. Pihak KUA akan menanyakan terlebih dahulu lokasi berlangsungnya pernikahan siri dan apakah ada bukti berupa surat dari penghulu yang menikahkan. Kemudian, pihak KUA akan memastikan kembali apakah syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Setelah itu, calon pengantin diarahkan untuk mengurus surat keterangan menikah dari desa atau kelurahan, serta surat keterangan nikah tidak tercatat dari KUA sebagai syarat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jika isbat dikabulkan, maka KUA akan menerbitkan buku nikah. Namun jika ditolak, maka pasangan harus melakukan pernikahan ulang atau *tajdid nikah* secara resmi di KUA.

Salah satu kasus yang secara langsung ditangani oleh Bapak H. Hasan Yamani adalah pernikahan siri antara pasangan berinisial RD dan HH yang terjadi pada tahun 2023. Pasangan tersebut menikah secara agama tanpa pencatatan resmi di KUA. Alasan utamanya karena pada saat itu usia mereka belum memenuhi syarat minimum untuk menikah secara legal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, pasangan yang ingin menikah di bawah umur harus

terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah di KUA. Namun, karena merasa proses ke Pengadilan Agama terlalu rumit dan tidak ingin menunggu hingga usia genap 19 tahun, akhirnya mereka memilih menikah secara siri melalui seorang tokoh agama.

Beberapa waktu kemudian, pasangan tersebut datang ke KUA Astambul dengan maksud untuk mencatatkan pernikahan secara resmi agar dapat memperoleh buku nikah, yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak. Saat itu, sang istri telah hamil tujuh bulan dan masih berusia di bawah 19 tahun. Menanggapi hal tersebut, kepala KUA menjelaskan bahwa pernikahan mereka tidak dapat langsung dicatatkan karena belum memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KUA menyarankan agar pasangan tersebut terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Setelah putusan dispensasi nikah dikabulkan, kepala KUA Astambul melaksanakan *tajdid nikah* atau nikah ulang secara resmi agar pernikahan tersebut tercatat secara sah menurut hukum negara.

Kemudian kasus selanjutnya yang ditangani oleh KUA Astambul adalah pasangan GA dan N yang menikah secara siri pada tahun 2020. Menurut keterangan kepala KUA Astambul, H. Hasan Yamani, alasan utama pasangan ini menikah siri adalah karena pada saat itu usia pihak perempuan masih di bawah umur yakni 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia minimal menikah menurut undang-undang. Setelah beberapa tahun

kemudian, pasangan ini datang ke KUA dengan tujuan untuk menikah resmi agar dapat memperoleh buku nikah, yang nantinya digunakan untuk membuat akta kelahiran anak mereka.

Dalam menangani kasus ini, KUA Astambul tidak menyarankan pasangan tersebut untuk menempuh sidang isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa permohonan isbat kemungkinan besar akan ditolak karena status pernikahan sebelumnya dilakukan ketika usia perempuan masih belum cukup umur secara hukum. Oleh karena itu, KUA mengambil langkah kebijakan dengan memberikan opsi *tajdid nikah* atau nikah ulang di KUA, selama data kependudukan pasangan tersebut tidak bermasalah. Langkah ini dinilai lebih efektif dan realistis untuk memberikan legalitas atas pernikahan mereka.

Menurut kepala KUA Kecamatan Astambul bahwa hambatan utama dalam penyelesaian kasus nikah siri seperti ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan batas usia pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan agama sudah cukup tanpa mempertimbangkan dampak hukum administratif, seperti kesulitan mengurus dokumen kependudukan anak atau perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum secara lebih masif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak lagi memilih jalan nikah siri sebagai solusi sementara.⁸⁴

⁸⁴ Hasan Yamani, Kepala KUA Kecamatan Astambul, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Juni 2025, Pukul 10:30 WITA.

2. KUA Kecamatan Mataraman

Identitas Informan 2

Nama Lengkap	: Ahmad Fauzi, S.H.I
Tempat & Tanggal Lahir	: Rantau Kujang, 03-11-1980
Pendidikan Terakhir	: S-1
Pekerjaan & Jabatan	: PNS Penghulu/Kepala KUA Mataraman
Alamat	: Komp. Antero Raya Permai 2 RT.06 Desa Indrasari Kecamatan Martapura

Di wilayah kerja KUA Kecamatan Mataraman, kasus pernikahan siri masih kerap ditemukan dengan jumlah yang cukup signifikan. Berdasarkan keterangan kepala KUA Mataraman, sepanjang pengamatan beliau terdapat lebih dari sepuluh kasus nikah siri yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya praktik nikah siri ini antara lain adalah usia calon pengantin yang belum mencukupi batas minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, enggan masyarakat untuk mengurus persidangan di Pengadilan Agama, tidak adanya dokumen resmi perceraian atau akta cerai bagi pasangan yang sebelumnya sudah menikah, serta situasi darurat seperti ketahuan berduaan oleh masyarakat yang kemudian mendorong dilangsungkannya pernikahan secara diam-diam demi menjaga nama baik keluarga.

Menanggapi fenomena tersebut, KUA Mataraman memiliki langkah-langkah sistematis dalam menangani pengajuan pencatatan nikah dari pasangan yang sebelumnya telah menikah siri. Langkah pertama yang selalu

disarankan adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai upaya legalisasi pernikahan yang telah berlangsung. Namun, apabila dokumen kependudukan calon pengantin lengkap dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka KUA juga membuka opsi *tajdid nikah* atau nikah ulang agar pencatatan dapat dilakukan secara resmi. Dalam praktiknya, KUA juga meminta pasangan untuk melengkapi dokumen berupa surat keterangan pernah menikah dari desa serta memastikan keabsahan data kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.

Kendala yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian kasus nikah siri adalah ketika pasangan telah memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut, tetapi secara hukum perdata syarat pencatatan nikahnya tidak terpenuhi. Selain itu, menurut Ahmad Fauzi, kelemahan dalam penanganan nikah siri juga berasal dari ketiadaan sanksi hukum yang tegas bagi pelakunya. Dalam perspektif fikih munakahat, pernikahan dianggap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun tidak tercatat secara administrasi negara. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat menganggap tidak pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

Bapak Ahmad Fauzi menilai bahwa praktik *tajdid nikah* adalah salah satu solusi yang paling praktis dan realistis dilakukan oleh KUA, khususnya jika permohonan isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama. Setelah pelaksanaan nikah ulang, pasangan yang telah memiliki anak dari pernikahan siri juga dianjurkan untuk mengajukan sidang asal-usul anak guna

memperoleh kejelasan hukum bagi anak tersebut. Beliau menegaskan bahwa *tajdid nikah* tidak menjadi masalah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah KUA Mataraman adalah pernikahan siri antara pasangan berinisial K dan A yang berlangsung pada tahun 2020. Berdasarkan keterangan kepala KUA Mataraman, Ahmad Fauzi, S.H.I., pernikahan ini dilangsungkan secara tidak tercatat karena beberapa alasan mendasar, antara lain karena ketidaktahuan terhadap aturan pernikahan, faktor ekonomi keluarga yang terbatas, serta usia calon pengantin yang belum memenuhi batas minimum usia nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu 19 tahun.

Pasangan ini kemudian datang ke kantor KUA dengan tujuan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, dengan harapan memperoleh buku nikah, kartu keluarga, dan BPJS sebagai bagian dari kebutuhan administratif dan akses layanan sosial. Menanggapi hal tersebut, pihak KUA memberikan kebijakan *tajdid nikah* atau nikah ulang, karena dianggap lebih efektif dan efisien daripada melalui jalur isbat nikah, dengan syarat data kependudukan lengkap dan status pernikahan di KTP tidak bermasalah.

Mekanisme *tajdid nikah* ini menjadi salah satu bentuk solusi dari KUA ketika menghadapi pasangan yang menikah secara siri tanpa melewati proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Menurut bapak Ahmad Fauzi, kebijakan ini diambil untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang mengalami kendala ekonomi, keterbatasan akses transportasi ke Pengadilan Agama, dan minimnya pemahaman terhadap prosedur hukum. Beliau menambahkan

bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas usia nikah dan biaya serta jarak menuju Pengadilan Agama yang dianggap memberatkan menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi nikah siri.

Dalam hal ini, *tajdid nikah* menjadi solusi alternatif yang dianggap sah menurut hukum Islam, selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa pendekatan ini tetap dilakukan secara hati-hati dan selektif, serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. KUA juga memastikan bahwa pasangan yang akan dinikahkan ulang tidak sedang dalam status perkawinan sah lainnya dan tidak memiliki dokumen kependudukan yang bertentangan.⁸⁵

3. KUA Kecamatan Karang Intan

Identitas Informan 3

Nama Lengkap : Muhammad Laili Sanusi, S.H.I., M.H
 Tempat & Tanggal Lahir : Gambut, 11-12-1984
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Pekerjaan & Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Karang Intan
 Alamat : JL. SMP 3 RT.10 Desa Indrasari
 Kecamatan Martapura

Praktik nikah siri di wilayah Kecamatan Karang Intan merupakan fenomena yang cukup tinggi. Kepala KUA Karang Intan menyampaikan bahwa jika ditinjau dari data perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah pernikahan yang tercatat, terdapat kesenjangan yang cukup besar.

⁸⁵ Ahmad Fauzi, Kepala KUA Kecamatan Mataraman, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Juni 2025, Pukul 14:30 WITA.

Sepuluh tahun yang lalu, pernikahan yang tercatat di KUA Karang Intan bisa mencapai lebih dari 350 pasangan setiap tahunnya. Namun, saat ini jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 200 lebih pasangan pertahun. Padahal secara logika, jumlah penduduk yang seharusnya bertambah, maka jumlah pernikahan seharusnya juga bertambah. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat praktik pernikahan yang tidak dicatat secara resmi, yang diduga kuat sebagai nikah siri.

Beberapa alasan yang mendorong terjadinya nikah siri antara lain: pertama, karena calon mempelai belum mencapai usia minimum untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki; kedua, karena adanya pasangan yang telah bercerai secara tidak resmi tetapi ingin menikah kembali tanpa mencatatkan perceraianya; ketiga, karena praktik poligami yang dilakukan tanpa izin resmi dari istri pertama dan tanpa prosedur hukum yang sah.

Dalam praktiknya, ketika ada pasangan yang menikah siri dan kemudian datang ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya, maka KUA Karang Intan akan terlebih dahulu memeriksa dokumen kependudukan mereka, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Bila ditemukan bahwa status pada KTP dan KK kedua belah pihak masih “belum kawin”, belum mempunyai anak, dan tidak dalam satu KK, maka KUA memberikan opsi untuk melakukan *tajdid nikah* atau nikah ulang secara resmi di KUA. Dalam kasus ini, tidak diperlukan proses isbat nikah ke

Pengadilan Agama karena secara administratif mereka dianggap belum menikah oleh negara.

Namun, apabila ditemukan bahwa data kependudukan pasangan sudah menunjukkan status “menikah”, atau mereka sudah memiliki anak dan tergabung dalam satu KK, maka KUA akan menyarankan agar pasangan tersebut mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan pernikahan dari negara. Baru setelah itu pernikahan dapat dicatatkan secara resmi di KUA dan pasangan tersebut dapat memperoleh buku nikah.

Pendekatan yang diterapkan oleh KUA Karang Intan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menyikapi fenomena nikah siri, namun tetap memperhatikan ketentuan hukum administrasi kependudukan dan hukum perkawinan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang cepat dan tidak membebani masyarakat, sekaligus menjaga agar proses pencatatan pernikahan tidak bertentangan dengan aturan negara.

Sebagai bentuk penerapan dari mekanisme yang telah dijelaskan, KUA Karang Intan memiliki pengalaman menangani kasus nikah siri dengan pendekatan *tajdid nikah* secara langsung di kantor KUA. Salah satu contoh kasus adalah pasangan berinisial N dan M, yang menikah secara siri pada sekitar tahun 2024. Alasan pasangan ini memilih menikah siri adalah karena keterbatasan waktu dan kondisi pekerjaan mereka di perusahaan, sehingga tidak sempat mengurus proses resmi pernikahan. Namun, setelah beberapa waktu, mereka menyadari pentingnya memiliki status pernikahan yang sah

secara hukum negara. Tujuan utama mereka mendaftarkan pernikahan ke KUA adalah agar pernikahannya resmi dan memperoleh buku nikah.

Dalam kasus ini, KUA Karang Intan melakukan langkah verifikasi terhadap dokumen kependudukan kedua belah pihak, termasuk KTP dan KK. Setelah diperiksa dan ditemukan bahwa status mereka di KTP masih “belum kawin”, belum memiliki anak, dan tidak berada dalam satu KK, maka KUA memberikan kebijakan untuk melangsungkan pernikahan ulang atau *tajdid nikah* di kantor KUA. Karena data administrasi tidak bermasalah, proses ini dapat dilakukan tanpa perlu melewati sidang isbat nikah di Pengadilan Agama.

Namun demikian, kasus ini juga memperlihatkan salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh KUA, yaitu pemahaman masyarakat yang keliru mengenai nikah siri. Banyak warga yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa nikah siri dapat menimbulkan kerugian hukum, seperti tidak memiliki buku nikah atau kesulitan dalam mengurus administrasi anak. Meski demikian, mereka tetap memilih jalur tersebut dengan alasan praktis, seperti kemudahan, menghindari proses hukum yang dianggap rumit, atau karena tekanan sosial dan ekonomi.

Dari pengalaman ini, kepala KUA Karang Intan menekankan pentingnya kebijakan penyelesaian nikah siri yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosialisasi, edukasi, dan kemudahan akses. Solusi ideal menurut beliau adalah memberikan ruang *tajdid nikah* di KUA sebagai alternatif penyelesaian bagi kasus-kasus tertentu

yang masih memenuhi syarat administrasi, dan bukan langsung mengarahkan seluruh kasus ke Pengadilan Agama. Pendekatan ini dianggap lebih *maslahat*, karena mampu mempercepat proses legalisasi pernikahan, menghindarkan masyarakat dari beban biaya, serta memperkuat legitimasi negara dalam pencatatan pernikahan.⁸⁶

4. KUA Kecamatan Martapura

Identitas Informan 4

Nama Lengkap : Drs. H. Abdul Basit, M.M.
Tempat & Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 27-07-1966
Pendidikan Terakhir : S-2
Pekerjaan & Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Martapura
Alamat : JL. Sekumpul Gg. Puji Rahayu No.161
Kecamatan Martapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Martapura, diketahui bahwa kasus nikah siri di wilayah ini bisa dikatakan lumayan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama karena pasangan yang sudah berpisah secara tidak resmi tidak segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Selain itu, pernikahan usia dini juga banyak terjadi karena pergaulan bebas di kalangan remaja, yang dipicu oleh putus sekolah atau sudah bekerja, sehingga orang tua merasa khawatir anaknya terjerumus dalam perzinahan. Sayangnya, ketika usia mereka belum mencapai 19 tahun dan

⁸⁶ Muhammad Laili Sanusi, Kepala KUA Kecamatan Karang Intan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Juni 2025, Pukul 15:00 WITA.

masyarakat enggan mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, maka pernikahan siri pun menjadi pilihan alternatif.

KUA Martapura sebenarnya sering kali menerima keinginan masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Namun, prosesnya tidak semudah itu. Salah satu kendala teknis yang kerap muncul adalah status calon pengantin di KTP masih tercatat “kawin” padahal mereka sudah bercerai secara siri. Untuk menikah ulang di KUA, status yang diakui harus “jejaka” atau “perawan”. Permintaan perubahan status ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sering kali ditolak karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Akhirnya, KUA mengambil langkah alternatif dengan meminta surat keterangan dari desa untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah jejaka atau perawan.

Menurut bapak H. Abdul Basit, nikah siri memiliki banyak kelemahan, terutama karena tidak adanya sanksi hukum bagi pelakunya. Bahkan dalam praktiknya, nikah siri juga rentan terhadap kesalahan hukum, seperti penunjukan wali nikah yang tidak sah. Contohnya, wali yang seharusnya adalah saudara kandung malah digantikan oleh paman dengan alasan lokasi atau sikap tidak setuju dari wali nikah. Ini jelas menyalahi aturan fikih dan hukum Islam. Terkait langkah penyelesaian hukum, apabila pasangan yang menikah secara siri telah memiliki anak, pihak KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Prosedur ini memerlukan surat keterangan dari pihak desa yang menyatakan bahwa mereka telah menikah, serta surat keterangan dari KUA yang menjelaskan

bahwa pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi. Jika permohonan dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, maka akta nikah dapat diterbitkan dan pernikahan dinyatakan sah menurut hukum negara.

Akan tetapi, terdapat pula kasus di mana permohonan isbat nikah ditolak. Salah satu contohnya adalah pasangan MRF dan AA yang menikah secara siri pada tahun 2022 saat keduanya masih berusia 18 tahun. Ketika mereka mengajukan isbat nikah pada tahun 2024, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama karena dianggap tidak memenuhi syarat hukum, salah satunya terkait usia pada saat pernikahan. Akhirnya, pada tahun 2025, usia keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah secara resmi dan belum memiliki seorang anak dalam pernikahan mereka. Dalam situasi seperti ini, pihak KUA menyarankan agar pasangan tersebut melangsungkan pernikahan ulang atau *tajdid nikah* secara resmi di KUA, sehingga pernikahan mereka dapat dicatat dan diakui secara hukum.⁸⁷

5. KUA Kecamatan Gambut

Identitas Informan 5

Nama Lengkap : Zulkifli HS, S.Ag., M.M.
 Tempat & Tanggal Lahir : Tambak Sirang, 09-07-1975
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Pekerjaan & Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Gambut
 Alamat : JL. Pematang Panjang KM.3,5 RT.03
 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut

⁸⁷ Abdul Basit, Kepala KUA Kecamatan Martapura, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 09:30 WITA.

Praktik nikah siri di wilayah Kecamatan Gambut tergolong cukup tinggi dan menunjukkan pola yang berulang dari tahun ke tahun. Menurut kepala KUA Gambut, sebagian besar pernikahan siri dilakukan oleh pasangan yang terdesak oleh kondisi sosial dan ekonomi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap regulasi pernikahan. Banyak di antara mereka memilih menikah secara siri melalui tokoh agama seperti tuan guru dengan alasan “penyelamatan moral” calon pengantin, terutama jika diketahui telah menjalin hubungan dekat atau bahkan khawatir terjadi kehamilan sebelum menikah.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri antara lain: Pertama, usia calon mempelai belum mencapai ketentuan undang-undang, yakni 19 tahun. Kedua, pasangan belum menyelesaikan status hukum perceraianya secara resmi melalui pengadilan. Ketiga, adanya ketidakmauan masyarakat untuk mengurus prosedur hukum, seperti permohonan dispensasi kawin atau isbat nikah, karena dianggap rumit dan memakan biaya serta waktu. Keempat, terjadi poligami tanpa izin istri sah dan tanpa persetujuan dari Pengadilan Agama, sehingga memilih jalur pernikahan bawah tangan.

Dalam merespon fenomena ini, KUA Gambut memiliki mekanisme penyelesaian yang bersifat selektif dan kontekstual. Pertama, dilakukan verifikasi terhadap latar belakang pernikahan dan status kependudukan calon pengantin, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan pada KTP dan kartu keluarga. Jika pasangan telah memiliki anak dari hasil nikah siri, maka KUA akan menyarankan proses isbat nikah ke Pengadilan Agama, agar

pernikahan memperoleh kekuatan hukum dan anak mendapat perlindungan legal. Namun, apabila pasangan belum memiliki anak dan status KTP maupun KK masih menunjukkan belum menikah, serta tidak terdapat data yang bermasalah, maka KUA memberikan opsi *tajdid nikah* atau nikah ulang secara resmi di KUA, selama seluruh syarat dan rukun pernikahan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di wilayah kerja KUA Gambut, kasus nikah siri tidak hanya terbatas pada pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan, tetapi juga mencakup mereka yang ingin mengakhiri hubungan siri secara sah untuk menikah kembali. Salah satu contoh yang mencerminkan kondisi ini adalah pasangan dengan inisial J dan P yang menikah secara siri pada tahun 2019. Alasan mereka tidak mencatatkan pernikahan di KUA saat itu adalah karena merasa proses administrasinya merepotkan. Namun setelah beberapa tahun berlalu dan hubungan mereka berakhir, PRN ingin menikah kembali dengan pasangan baru. Untuk itu, ia memerlukan dokumen resmi perceraian berupa akta cerai, yang hanya dapat diperoleh melalui proses hukum.

Tindakan yang diambil oleh pihak KUA Gambut dalam menangani kasus tersebut adalah mengarahkan yang bersangkutan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan agar status hukum perkawinan mereka yang sebelumnya tidak tercatat bisa disahkan terlebih dahulu, sehingga proses perceraian juga dapat diakui secara legal. Selain itu, mengingat pasangan ini sudah memiliki anak dari hasil pernikahan siri, ada kemungkinan juga akan

dilakukan sidang tambahan mengenai penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, demi menjamin hak-hak perdata anak di kemudian hari.

Kasus ini memperlihatkan bahwa penyelesaian hukum terhadap nikah siri yang disusul dengan perceraian tidak cukup hanya dengan proses nikah ulang atau *tajdid nikah*, melainkan memerlukan mekanisme formal melalui Pengadilan Agama agar status pernikahan dan perceraian dapat diakui secara resmi oleh negara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap individu, terutama perempuan dan anak, dapat terpenuhi secara menyeluruh.⁸⁸

6. KUA Kecamatan Simpang Empat

Identitas Informan 6

Nama Lengkap : Basni, S.Ag., M.M.
 Tempat & Tanggal Lahir : Ulin, 04-05-1973
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Pekerjaan & Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Simpang Empat
 Alamat : Desa Simpang Empat RT.02
 Kecamatan Simpang Empat

Wilayah KUA Kecamatan Simpang Empat, praktik pernikahan siri cukup sering terjadi dan menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Meskipun tidak seluruh kasus dapat terdeteksi secara langsung oleh KUA, keberadaan pernikahan di luar pencatatan negara ini bukanlah sesuatu yang baru. Berdasarkan keterangan dari kepala KUA, terdapat sejumlah motif yang melatarbelakangi masyarakat memilih jalan pernikahan siri. Pertama, beban

⁸⁸ Zulkifli HS, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17 Juni 2025, Pukul 14:30 WITA.

administratif yang dianggap merepotkan, seperti keharusan melampirkan dokumen kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran) serta surat keterangan dari aparat desa, membuat banyak pasangan memilih jalur nonformal. Banyak di antara mereka, khususnya yang berprofesi sebagai petani atau buruh harian, tidak memiliki kesadaran atau kemampuan administratif untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kedua, usia calon pengantin yang belum mencapai batas minimal 19 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga menjadi alasan utama. Ketiga, adanya kondisi mendesak seperti kehamilan pranikah atau perceraian yang belum disahkan secara hukum, menyebabkan pasangan lebih memilih menikah siri untuk menghindari aib sosial atau dianggap melanggar norma agama.

Dalam menangani fenomena tersebut, KUA Simpang Empat melakukan pendekatan bertahap dan berbasis klarifikasi. Ketika informasi mengenai nikah siri diterima, langkah pertama yang dilakukan adalah tabayyun terhadap kebenaran informasi dari pihak informan. Setelah itu, KUA akan meminta pasangan yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi langsung, dengan maksud agar pernikahan mereka dapat segera dilegalkan melalui dua jalur: isbat nikah di Pengadilan Agama atau *tajdid nikah* di KUA. Pengambilan langkah ini tergantung pada kondisi masing-masing pasangan. Jika pasangan telah memiliki anak dari pernikahan siri, maka dianjurkan untuk mengajukan isbat nikah terlebih dahulu untuk menjamin keabsahan hukum anak tersebut. Sebaliknya, jika belum memiliki anak dan dokumen kependudukan masih memungkinkan (misalnya status di

KTP belum tercatat sebagai kawin), maka nikah ulang atau *tajdid nikah* dapat dilaksanakan langsung di KUA dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif yang berlaku.

Adapun bukti yang diminta oleh pihak KUA sebagai validasi pernikahan siri adalah adanya dokumen tertulis (meskipun tidak resmi) dari pihak yang menikahkan biasanya tokoh agama seperti tuan guru dan berupa dokumentasi foto pelaksanaan akad nikah. Hal ini bertujuan untuk menghindari manipulasi data dan memberikan kejelasan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa nikah siri tersebut, baik mempelai, wali, saksi, maupun penghulu tidak resmi. Tantangan terbesar dalam mekanisme penyelesaian ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat seringkali menganggap bahwa pencatatan nikah bukanlah hal yang penting, selama pernikahan dianggap sah secara agama. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang menunda atau bahkan mengabaikan proses legalisasi, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti anak tanpa status hukum yang jelas, kesulitan mengurus dokumen kependudukan, dan kerentanan hak-hak perdata, terutama bagi perempuan dan anak.

Salah satu kasus nikah siri yang terjadi di wilayah kerja KUA Simpang Empat adalah pernikahan antara A dan R yang berlangsung pada tahun 2020. Pernikahan ini dilakukan secara siri karena calon pengantin perempuan masih berada di bawah umur dan tidak memungkinkan untuk mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Tujuan utama dari pasangan ini untuk menikah ulang secara resmi di KUA adalah agar dapat memperoleh buku nikah sebagai

syarat administratif untuk membuat akta kelahiran anak mereka. Pada awalnya, pihak KUA menyarankan agar pasangan ini menempuh jalur isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, meskipun terdapat kekeliruan dalam proses pernikahan siri sebelumnya, yakni penggunaan wali nikah yang tidak sesuai yaitu wali paman kandung, padahal masih memiliki saudara laki-laki kandung yang sudah mencukupi syarat, Pengadilan Agama justru mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, pihak KUA mengambil langkah dengan memberikan kebijakan untuk melaksanakan pernikahan ulang atau *tajdid nikah* di KUA, menggunakan wali nikah yang sah sesuai ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu saudara kandung laki-laki dari pihak perempuan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktik di lapangan, seringkali KUA harus menyelesaikan problem nikah siri dengan pendekatan hati-hati dan adaptif terhadap kondisi fakta lapangan di masyarakat, termasuk bila ditemukan adanya kekeliruan pada tahapan isbat nikah.⁸⁹

⁸⁹ Basni, Kepala KUA Kecamatan Simpang Empat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 19 Juni 2025, Pukul 15:00 WITA.

C. Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kabupeten Banjar Tentang Penyelesaian Hukum Nikah Siri

1. KUA Kecamatan Astambul

Dalam pandangan hukum yang berlaku di Indonesia, sebenarnya sudah tersedia cara yang sah untuk menyelesaikan masalah nikah siri. Kepala KUA Astambul menjelaskan bahwa pasangan yang menikah secara siri bisa mendapatkan kepastian hukum melalui sidang isbat nikah di Pengadilan Agama atau dengan mengajukan dispensasi nikah bagi yang belum cukup umur. Artinya aturan hukumnya sudah ada dan jelas. Akan tetapi, masalahnya bukan karena tidak ada aturan melainkan karena masyarakat sering enggan mengurusnya.

Beberapa alasan kenapa masyarakat enggan menempuh jalur hukum, diantaranya karena prosesnya dianggap merepotkan, tidak punya waktu luang karena pekerjaan terutama bagi pekerja kontrak dan yang paling sering adalah tidak punya cukup uang untuk membayar biaya sidang. Menurut beliau perlu ada perbaikan dari sistem yang ada, misalnya dengan menggratiskan biaya proses isbat nikah di Pengadilan Agama seperti halnya pencatatan nikah resmi di kantor KUA yang saat ini sudah tidak dipungut biaya. Karena sama-sama lembaga pemerintah, seharusnya Pengadilan Agama juga bisa memberikan layanan hukum yang mudah dan gratis.

Beliau juga menyarankan agar proses sidang isbat nikah bisa dipercepat dan disederhanakan. Hal ini penting karena banyak masyarakat yang berasal dari desa atau daerah yang jauh dari kota, sehingga kesulitan untuk bolak-

balik ke Pengadilan Agama karena jarak dan biaya transportasi. Maka dari itu, perbaikan kebijakan penyelesaian nikah siri seharusnya tidak hanya fokus pada aturan hukumnya saja, tetapi juga perlu memperhatikan kemudahan prosedur agar semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan keadilan secara nyata.⁹⁰

2. KUA Kecamatan Mataraman

Kepala KUA Kecamatan Mataraman mengemukakan bahwa fenomena nikah siri masih cukup marak terjadi di wilayah tugasnya. Menurutnya, penyebab utama nikah siri antara lain adalah usia calon pengantin yang belum memenuhi ketentuan undang-undang, ketidaktahuan terhadap prosedur hukum yang berlaku, tekanan dari pihak keluarga, serta alasan ekonomi dan administratif seperti tidak memiliki akta cerai atau sulitnya mengurus persyaratan nikah resmi.

Menghadapi situasi ini, KUA Mataraman menerapkan tiga langkah utama sebagai bentuk penyelesaian nikah siri. Pertama, apabila pasangan yang melakukan nikah siri telah memiliki anak atau dokumen kependudukannya sudah menunjukkan status menikah, maka KUA menyarankan untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahan mereka memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Kedua, jika kondisi administrasi pasangan masih memungkinkan, seperti belum tercatat menikah di KTP dan KK serta tidak memiliki anak, maka KUA memberikan

⁹⁰ Hasan Yamani, Kepala KUA Kecamatan Astambul, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Juni 2025, Pukul 10:30 WITA.

kebijakan *tajdid nikah* atau pernikahan ulang di KUA tanpa harus melalui proses isbat di pengadilan. Ketiga, dalam kasus di mana isbat nikah ditolak, misalnya karena menikah di bawah umur, maka KUA memfasilitasi pernikahan ulang dan menganjurkan pasangan tersebut untuk mengikuti sidang asal-usul anak guna memperoleh akta kelahiran bagi anak hasil pernikahan siri tersebut.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang dihadapi, di antaranya adalah tidak adanya sanksi hukum yang tegas bagi pelaku nikah siri dan minimnya regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang penanganan kasus ini. Dalam pandangan beliau, meskipun secara fikih munakahat pernikahan siri tetap sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya, namun secara hukum negara tetap tidak memiliki kekuatan legal tanpa pencatatan. Oleh sebab itu, beliau menilai bahwa *tajdid nikah* dapat dijadikan sebagai alternatif solusi yang layak diterapkan, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki hambatan administratif. Bapak Ahmad Fauzi juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko hukum dari nikah siri, terutama bagi perempuan dan anak yang seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan perlu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pencatatan nikah bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai perlindungan hukum yang sangat penting dalam kehidupan keluarga.⁹¹

⁹¹ Ahmad Fauzi, Kepala KUA Kecamatan Mataraman, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Juni 2025, Pukul 14:30 WITA.

3. KUA Kecamatan Karang Intan

Menurut kepala KUA Karang Intan salah satu faktor utama yang menyebabkan persoalan nikah siri terus berulang adalah tidak adanya sanksi hukum yang tegas dari pemerintah terhadap pelaku nikah siri. Ia menyatakan bahwa meskipun masyarakat telah mengetahui kerugian dari nikah siri seperti tidak memiliki buku nikah, tidak bisa membuat gabung Kartu Keluarga, dan status anak menjadi tidak sah menurut hukum negara namun tetap saja mereka memilih jalan tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah karena masyarakat menganggap bahwa pernikahan siri masih bisa “disahkan” melalui jalur isbat nikah di kemudian hari, terutama saat mereka membutuhkan dokumen resmi seperti buku nikah.

Melihat realitas ini, beliau menekankan bahwa penyelesaian nikah siri harus dilakukan melalui dua jalur. Pertama, *tajdid nikah* atau nikah ulang di KUA bagi pasangan yang belum tercatat menikah dalam dokumen kependudukan dan belum memiliki anak. Kedua, isbat nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan yang sudah memiliki anak, sudah tercatat menikah dalam KTP atau KK, atau sudah tergabung dalam satu KK. Strategi ini dianggap lebih maslahat dan efektif dibandingkan memaksakan semua kasus untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Menurut bapak Muhammad Laili Sanusi juga menyoroti perbedaan kebijakan antar-KUA dalam menangani kasus nikah siri. Ada KUA yang memperbolehkan nikah ulang dan ada juga KUA yang mengarahkan untuk mengajukan isbat nikah terlebih dahulu. Perbedaan ini terjadi karena belum

adanya regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur tentang tata cara dan batasan kebolehan melakukan nikah ulang bagi pasangan nikah siri. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar dibuat regulasi atau pedoman nasional yang baku tentang penanganan nikah siri, termasuk keabsahan *tajdid nikah* di KUA. Dengan adanya aturan yang jelas, maka semua KUA di Indonesia akan memiliki pedoman yang seragam dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Lebih lanjut, bapak Muhammad Laili Sanusi juga mengusulkan perlunya sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak hukum dari nikah siri. Ia menekankan bahwa selama tidak ada kesadaran hukum dari masyarakat, maka kebijakan apapun akan sulit dijalankan. Sosialisasi tidak hanya berfokus pada aturan pernikahan, tetapi juga harus menjelaskan secara gamblang konsekuensi hukum dan sosial dari menikah secara siri.⁹²

4. KUA Kecamatan Martapura

Kepala KUA Martapura menilai bahwa sistem dan regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam kasus nikah siri. Pertama, perlu adanya fleksibilitas dalam regulasi usia minimal pernikahan. Menurut kepala KUA Martapura, peraturan yang menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun justru meningkatkan angka nikah siri hingga 400% secara nasional. Maka beliau mengusulkan agar usia

⁹² Muhammad Laili Sanusi, Kepala KUA Kecamatan Karang Intan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Juni 2025, Pukul 15:00 WITA.

minimal pernikahan dikaji ulang, misalnya kembali ke usia 16 tahun seperti sebelumnya dengan tetap memberikan perlindungan hukum dan pengawasan. Kedua, *tajdid nikah* bisa dijadikan sebagai solusi yuridis dan administratif untuk melegalkan pernikahan siri, selama terpenuhi rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan hukum positif. KUA dapat mengambil peran aktif dalam proses *tajdid nikah* ini, tanpa harus selalu menunggu hasil isbat nikah yang prosesnya panjang dan sering berakhir dengan penolakan. Ketiga, untuk menjamin kepastian hukum, perlu juga penyesuaian aturan pada sistem administrasi kependudukan. Aturan terbaru dari Disdukcapil yang mewajibkan buku nikah untuk keperluan penggabungan kartu keluarga sejak mulai tahun 2023 membuat pasangan nikah siri semakin sulit mendapatkan pengakuan hukum dan administratif. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara regulasi Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Disdukcapil agar masyarakat yang telah menikah siri tetap bisa diakomodasi hak-haknya secara hukum dan negara.

Terakhir, penting untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari *maqâsid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, negara semestinya hadir dengan memberikan kemudahan, bukan justru mempersulit masyarakat yang ingin memperbaiki status hukum pernikahannya.⁹³

⁹³ Abdul Basit, Kepala KUA Kecamatan Martapura, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 09:30 WITA.

5. KUA Kecamatan Gambut

Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Gambut bahwa penyelesaian hukum terhadap nikah siri perlu lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat, namun tetap berada dalam koridor hukum dan syariah. Menurut beliau, salah satu persoalan utama yang memicu maraknya nikah siri adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan di KUA. Banyak warga beranggapan bahwa selama pernikahan sah secara agama, legalitas negara dapat diurus kemudian, terutama ketika dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anak atau Kartu Keluarga. Pandangan ini, menurut beliau, semakin diperkuat oleh fenomena isbat nikah massal yang justru memicu sebagian masyarakat untuk sengaja menikah siri terlebih dahulu karena merasa akan tetap “disahkan” di kemudian hari.

Dalam pandangannya, langkah ideal untuk mengatasi hal ini adalah dengan membatasi ruang toleransi terhadap praktik nikah siri melalui penerapan sanksi administratif atau pidana ringan yang memberi efek jera. Selain itu, perlu ditegaskan aturan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar tidak mengubah status perkawinan dalam dokumen kependudukan tanpa bukti resmi berupa buku nikah. Hal ini penting untuk mencegah manipulasi data serta menjaga integritas sistem hukum pernikahan nasional.

Beliau juga menekankan pentingnya memperkuat sosialisasi hukum pernikahan secara berkelanjutan, terutama menyoasar kalangan remaja, orang tua, dan tokoh agama lokal. Pendidikan mengenai pentingnya pencatatan

perkawinan, menurut beliau, harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara kolaboratif oleh Kemenag, Dukcapil, Pengadilan Agama, dan perangkat desa. Perspektif ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui edukasi yang masif, disertai penegakan aturan yang tegas, menjadi kunci dalam menekan angka nikah siri dan melindungi hak-hak perempuan serta anak.⁹⁴

6. KUA Kecamatan Simpang Empat

Kepala KUA Simpang Empat menyampaikan bahwa penyelesaian hukum nikah siri perlu dirancang secara lebih sistemik, integratif, dan humanis. Menurut beliau, selama ini penanganan nikah siri belum memiliki payung hukum yang tegas dan mengikat. Ketiadaan sanksi hukum yang jelas bagi pelaku nikah siri menyebabkan praktik ini semakin marak dan sulit dikendalikan. Dalam pandangannya, regulasi yang bersifat preventif dan kuratif sangat diperlukan. Aspek preventif dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, seperti penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan pranikah, serta sinergi lintas sektor antara KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pemerintah desa. Langkah ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum sejak awal bahwa pencatatan perkawinan adalah hak sekaligus kewajiban warga negara untuk melindungi masa depan mereka dan anak keturunannya.

Beliau juga menilai penting adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan nikah siri yang dapat dijadikan acuan bagi KUA, mulai

⁹⁴ Zulkifli HS, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17 Juni 2025, Pukul 14:30 WITA.

dari tahap pelaporan, klarifikasi, legalisasi, hingga pembinaan pascanikah. Dalam SOP tersebut, pelaporan nikah siri kepada aparat desa dan KUA harus menjadi kewajiban, dengan batas waktu tertentu bagi pasangan untuk mengurus legalisasi melalui jalur resmi. Selain itu, beliau menyoroti perlunya pembaruan regulasi tentang dispensasi nikah, khususnya dalam hal kemudahan dan keringanan persyaratan. Menurutnya, pembatasan usia menikah menjadi 19 tahun, meskipun bertujuan melindungi anak, dalam praktik justru dapat memperbesar peluang terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, kebijakan batas usia menikah sebaiknya dikaji ulang atau minimal diberi kelonggaran prosedural bagi keluarga dengan alasan darurat, seperti kehamilan atau faktor sosial tertentu.⁹⁵

Berikut ini penulis sajikan tabel perbandingan antara mekanisme dan perspektif kepala KUA mengenai penyelesaian hukum nikah siri di KUA Kabupaten Banjar.

No	Informan	Mekanisme Penyelesaian Hukum Nikah Siri	Perspektif Kepala KUA Penyelesaian Nikah Siri
1	Kepala KUA Astambul	Verifikasi lokasi dan bukti nikah siri disarankan surat dari desa dan surat keterangan tidak tercatat kemudian Isbat nikah, Jika isbat berpotensi ditolak, maka nikah ulang atau <i>tajdid nikah</i> di KUA.	Mengusulkan agar biaya isbat digratiskan seperti nikah resmi di KUA, Proses sidang isbat perlu dipercepat, Fokus pada kemudahan prosedural agar masyarakat tidak terkendala biaya dan waktu.

⁹⁵ Basni, Kepala KUA Kecamatan Simpang Empat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 19 Juni 2025, Pukul 15:00 WITA.

2	Kepala KUA Mataraman	Sarankan isbat nikah jika sudah punya anak atau dokumen menunjukkan status kawin, Jika dokumen aman dan belum punya anak, bisa <i>tajdid nikah</i> atau nikah ulang di KUA.	Perlunya sanksi tegas bagi pelaku nikah siri, Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, <i>Tajdid nikah</i> dipandang efektif untuk mereka yang mengalami kendala biaya dan akses ke Pengadilan Agama.
3	Kepala KUA Karang Intan	<i>Tajdid nikah</i> jika KTP dan KK masih “belum kawin”, belum punya anak, dan belum satu KK, Jika sudah punya anak atau status kawin, diarahkan isbat nikah ke Pengadilan Agama.	Perlu regulasi nasional tentang tata cara <i>tajdid nikah</i> , <i>Tajdid nikah</i> dinilai maslahat, lebih cepat, murah, dan sah jika syarat rukun terpenuhi, Sosialisasi perlu digiatkan agar masyarakat paham dampak nikah siri.
4	Kepala KUA Martapura	Periksa status KTP dan Kartu Keluarga, jika status “kawin”, minta surat keterangan dari desa agar status bisa dikoreksi, Sarankan isbat nikah bagi yang sudah punya anak.	Mengusulkan penurunan usia nikah kembali ke 16 tahun bagi perempuan, <i>Tajdid nikah</i> sebagai solusi untuk pernikahan yang ditolak isbatnya, Perlu sinkronisasi antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan Dukcapil agar data kependudukan tidak menyulitkan proses legalisasi nikah.

5	Kepala KUA Gambut	Verifikasi status KTP dan Kartu Keluarga, Bila sudah punya anak diarahkan isbat nikah, Bila belum punya anak dan status belum kawin, bisa nikah ulang atau <i>tajdid nikah</i> di KUA.	Batasi toleransi terhadap nikah siri, dorong efek jera, Isbat massal dinilai malah mendorong nikah siri, Sosialisasi hukum sejak dini melalui kerja sama dengan berbagai instansi untuk membentuk kesadaran pencatatan nikah.
6	Kepala KUA Simpang Empat	Klarifikasi melalui tabayyun jika info nikah siri masuk, Validasi melalui bukti surat dan foto, Bila sudah punya anak diarahkan isbat nikah, Bila tidak, bisa <i>tajdid nikah</i> di KUA dengan syarat dan ketentuan harus terpenuhi.	Mengusulkan SOP nasional penanganan nikah siri: dari pelaporan, legalisasi, hingga pembinaan- Perlu regulasi komprehensif yang berisi sanksi, Pendidikan hukum dan nilai <i>maqâsid al-syari'ah</i> melalui pengajian agama, khutbah, dan kolaborasi lintas sektor dianggap lebih efektif daripada sekadar aturan normatif.

D. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, penulis melakukan analisis berdasarkan dua teori utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu teori *maqâsid al-syarî'ah* Jasser Auda dan teori kepastian hukum. Analisis ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama dalam penelitian, yakni bagaimana mekanisme penyelesaian hukum terhadap kasus nikah siri dan bagaimana perspektif kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terkait penyelesaian nikah siri agar dapat selaras dengan nilai-nilai syariah dan prinsip kepastian hukum.

1. Analisis Teori *Maqâsid al-Syarî'ah*

Dalam menelaah kasus-kasus nikah siri yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar, teori *maqâsid al-syarî'ah* dari Jasser Auda memberikan kerangka yang sangat kuat untuk memahami esensi hukum Islam dalam konteks sosial modern. Syariat tidak hanya bertujuan melahirkan peraturan formal, tetapi yang lebih utama adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat*.

Dalam menangani kasus-kasus nikah siri di Kabupaten Banjar, teori *maqâsid al-syarî'ah* dari Jasser Auda menawarkan cara pandang yang berbeda dari pemikiran klasik. Menurut Auda, *maqâsid* (tujuan-tujuan hukum Islam) bukan hanya kumpulan tujuan hukum yang kaku, tetapi merupakan cara berpikir hukum yang hidup, fleksibel, dan bisa menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Beliau mengubah pendekatan *maqashid* dari yang sifatnya

tetap menjadi metode yang bisa membawa perubahan. Pendekatan ini sangat relevan dalam menangani masalah nikah siri, karena persoalannya tidak hanya soal agama atau hukum saja, tapi juga menyangkut budaya, kondisi sosial ekonomi dan sistem pemerintahan.

Persoalan nikah siri tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga mencerminkan ketiadaan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, praktik ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara nilai-nilai syariah dengan sistem hukum formal negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani ketegangan antara norma-norma keislaman dan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, teori *maqâsid al-syarî'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi sangat relevan. Pendekatan beliau menitikberatkan pada substansi ajaran syariah seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar daripada sekadar menekankan aspek legalitas yang bersifat formalistik. Dengan demikian, teori ini membuka ruang bagi penyelesaian hukum yang lebih manusiawi, kontekstual, dan sejalan dengan nilai-nilai luhur syariah.

Menurut penulis, teori *maqâsid al-syarî'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda sangat relevan digunakan untuk memahami penyelesaian hukum terhadap nikah siri. Dalam pendekatannya, Jasser Auda menawarkan enam prinsip sistem: Sifat kognitif sistem hukum Islam (*Cognitive Nature of System*), Keutuhan (*Wholeness*), Keterbukaan sistem hukum Islam

(*Openness*), Keterkaitan tingkatan dalam hukum Islam (*Interrelated Hierarchy*), Multidimensionalitas sistem hukum Islam (*Multidimensionality*), dan Kebertujuan sistem hukum Islam (*Purposefulness*).⁹⁶

Pertama, sifat kognitif (*Cognitive Nature of System*) Jasser Auda menekankan bahwa sistem hukum Islam bersifat kognitif, yakni terbuka terhadap realitas sosial dan senantiasa responsif terhadap perubahan zaman. Hukum Islam, dalam kerangka ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan final, melainkan hasil dari proses ijtihad manusia yang dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya dan kebutuhan umat. Pendekatan ini menolak pandangan legalistik yang memisahkan hukum dari realitas dan justru menekankan pentingnya relevansi dan kebermanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁹⁷

Penerapan prinsip ini tercermin dalam kebijakan yang dilakukan oleh kepala KUA Karang Intan. Dalam salah satu kasus, pasangan yang datang untuk mendaftarkan pernikahan sebelumnya telah melakukan nikah siri karena alasan tertentu, yaitu keterbatasan waktu dan kondisi pekerjaan di perusahaan yang membuat mereka tidak sempat mengurus pernikahan secara resmi melalui KUA. Saat kondisi sudah memungkinkan, mereka menyadari pentingnya status pernikahan yang sah menurut hukum negara dan memutuskan untuk datang ke KUA guna mendaftarkan pernikahan dan memperoleh buku nikah. Dalam menghadapi kasus semacam ini, kepala KUA

⁹⁶ Faizin, "*Rekonstruksi Maqashid Al-Syariah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer*", *Tajdid*: Vol.22 No.2 November (2019), h. 180.

⁹⁷ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, h. 165.

Karang Intan memberikan solusi berupa *tajdid nikah* atau nikah ulang di KUA. Setelah itu, pernikahan dicatatkan secara resmi, sehingga pasangan tersebut memperoleh status hukum yang diakui negara.

Langkah ini mencerminkan bahwa kepala KUA Karang Intan menjalankan hukum dengan pendekatan yang responsif dan solutif menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Meskipun *tajdid nikah* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, langkah ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁹⁸

Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh kepala KUA Karang Intan merupakan bentuk nyata penerapan sifat kognitif dalam hukum Islam, di mana ijtihad kelembagaan digunakan untuk memberi solusi yang adil, *mâslahat*, dan sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Hukum tidak dipaksakan dalam bentuk yang kaku, melainkan diarahkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, keutuhan (*Wholeness*) dalam teori sistem, Jasser Auda mengajukan prinsip keutuhan sebagai pendekatan integral dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Menurut Jasser Auda, hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi saja. Artinya, saat berbicara tentang hukum, kita tidak boleh hanya melihat teks atau aturan

⁹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tertulis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan hukum, kondisi masyarakat, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia.⁹⁹

Prinsip keutuhan ini sangat penting diterapkan dalam penyelesaian kasus nikah siri. Masalah nikah siri bukan hanya soal absennya pencatatan pernikahan, melainkan juga berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, status hukum keluarga, dan kehormatan sosial pasangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan pandangan hukum, agama, sosial, dan bahkan psikologis secara terpadu.

Kepala KUA Martapura menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa hanya berpegang pada pendekatan normatif semata dalam menghadapi nikah siri. Banyak masyarakat yang datang dengan kondisi kompleks, ada yang tidak memiliki dokumen lengkap, menikah di bawah umur, atau menggunakan wali yang tidak sah. Dalam kasus-kasus seperti ini, solusi yang dipilih tidak cukup hanya berbasis aturan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan *mâslahat* jangka panjang, terutama perlindungan terhadap anak dan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, KUA Martapura kerap menyarankan isbat nikah atau *tajdid nikah* sebagai jalan keluar yang tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga menguatkan posisi hukum pasangan secara formal.

Menurut penulis, pendekatan seperti ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *wholeness* dalam praktik. Penyelesaian nikah siri tidak dilihat dari sisi hukum formal saja, melainkan dari sisi maqashid, yaitu

⁹⁹ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, h. 166.

bagaimana melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-ird*) dan memastikan keadilan sosial dalam rumah tangga.

Ketiga, keterbukaan (*Openness*) dalam pandangan Jasser Auda, hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Artinya, hukum tidak berdiri sendiri secara tertutup, tetapi harus mampu merespons berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Prinsip keterbukaan ini menjadi dasar agar hukum Islam tetap kontekstual, relevan, dan memberikan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi umat.¹⁰⁰

Prinsip keterbukaan ini tercermin dalam praktik *tajdid nikah* yang dilakukan oleh kepala KUA Astambul, sebagai respons atas berbagai keterbatasan masyarakat, seperti risiko penolakan dari Pengadilan Agama. Kepala KUA Astambul, menyatakan bahwa *tajdid nikah* sering menjadi solusi praktis, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi ditolak oleh Pengadilan Agama. Dengan mengulang akad secara resmi di KUA, pasangan tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa harus melalui proses yang memberatkan secara administratif.

Menurut penulis, kebijakan ini menunjukkan bahwa lembaga KUA tidak hanya menjalankan fungsi normatif keagamaan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan. Pilihan untuk melakukan *tajdid nikah* adalah bentuk keterbukaan hukum Islam terhadap kenyataan di lapangan, sebagaimana ditekankan oleh Jasser Auda, bahwa sistem hukum Islam seharusnya tidak tertutup dari konteks sosial masyarakat.

¹⁰⁰ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, h. 166.

Keempat, keterkaitan hirarki (*Interrelated Hierarchy*) menurut teori yang dikembangkan oleh Jasser Auda, *maqâsid al-syarî'ah* tidak disusun dalam hirarki yang tetap dan kaku, melainkan bersifat dinamis dan saling berhubungan satu sama lain. Dalam keadaan tertentu, salah satu tujuan syariat dapat menjadi lebih utama daripada yang lain, tergantung pada situasi yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam perlu mempertimbangkan perubahan prioritas antara aspek *daruriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap).¹⁰¹

Penanganan kasus nikah siri merupakan contoh nyata penerapan prinsip ini. Masalah nikah siri secara langsung menyentuh ranah *daruriyyat*, khususnya dalam hal menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), seperti kejelasan nasab dan status hukum anak. Namun, persoalan ini juga berdampak pada aspek *hajiyyat*, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial bagi istri dan anak. Bahkan, dalam jangka panjang, persoalan ini juga menyentuh aspek *tahsiniyyat*, yaitu menjaga martabat, kehormatan keluarga, dan keteraturan sosial.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan kepala KUA Mataraman. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa *tajdid nikah* penting dilakukan bagi pasangan yang tidak bisa mengajukan isbat nikah karena terkendala masalah ekonomi yang terbatas dan prosedur hukum yang rumit. Menurut beliau, legalisasi ulang pernikahan ini bukan hanya untuk memenuhi syarat

¹⁰¹ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, h. 167.

hukum, tetapi juga untuk memastikan anak-anak bisa mendapatkan haknya atas pendidikan dan layanan kesehatan serta agar keluarga tersebut lebih dihargai di mata masyarakat.

Pendekatan seperti ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prinsip tingkatan kebutuhan dalam *maqâsid al-syari'ah*. Ketika kebutuhan pokok (*daruriyyat*) tidak bisa dipenuhi lewat jalur hukum formal seperti isbat nikah, maka solusi alternatif seperti *tajdid nikah* menjadi pilihan yang membawa kebaikan (*maslahat*). Sebab, cara ini bisa sekaligus menjaga kebutuhan utama, kebutuhan sekunder, dan pelengkap bagi keluarga secara menyeluruh.

Kelima, multidimensionalitas (*Multidimensionality*) dalam teori sistem *maqâsid al-syari'ah*, Jasser Auda menekankan bahwa persoalan hukum Islam bersifat multidimensional. Artinya, suatu persoalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat satu sisi atau pendekatan tunggal. Sebaliknya, harus dilihat dari berbagai dimensi yang saling terkait, baik sosial, hukum, agama, budaya, hingga ekonomi. Pemahaman yang parsial hanya akan menghasilkan solusi yang sempit dan kurang menyentuh akar masalah secara menyeluruh.¹⁰²

Penanganan kasus nikah siri di masyarakat merupakan salah satu contoh persoalan yang membutuhkan pendekatan multidimensi. Nikah siri bukan hanya persoalan administrasi pencatatan pernikahan, tetapi juga menyangkut kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi, pemahaman

¹⁰² Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, h. 168.

agama, budaya lokal, serta keterlibatan lintas lembaga seperti KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan.

Kepala KUA Simpang Empat, menyatakan bahwa tantangan utama dalam menangani nikah siri adalah rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, lemahnya literasi hukum agama, keterbatasan ekonomi, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Beliau menegaskan bahwa penyelesaian nikah siri tidak cukup hanya dari Kantor Urusan Agama saja, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif antar lembaga dan sektor, baik pemerintah, tokoh agama, maupun lembaga sosial masyarakat.

Menurut penulis, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa solusi terhadap nikah siri harus melibatkan kebijakan lintas sektor dan sinergi berbagai pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *multidimensionality* yang menekankan pentingnya keterpaduan aspek-aspek kehidupan dalam menegakkan *maqâsid al-syarî'ah*. Sebuah kebijakan hanya akan efektif jika mampu menyentuh dimensi sosial (kesadaran dan budaya), ekonomi (kemampuan biaya), hukum (akses terhadap isbat nikah atau *tajdid nikah*), dan agama (pemahaman akan kewajiban pencatatan nikah).

Keenam, *kebertujuan (Purposefulness)* dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, prinsip kebertujuan menegaskan bahwa dalam suatu sistem, tujuan adalah hal yang paling penting. Sebab, sistem dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dalam hukum Islam, tujuan atau *maqâsid al-syarî'ah* menjadi inti dari lahirnya hukum-hukum Islam. Artinya, semua aturan dalam Islam dibuat untuk mencapai kebaikan

dan manfaat bagi manusia. Tujuan hukum Islam ini juga mencakup lima ciri penting dalam sistem hukum Islam, yaitu: sifat kognitif (berbasis akal dan pemahaman), keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, dan sifat multidimensional. Semua ciri tersebut saling terhubung dan semuanya diarahkan untuk mencapai satu hal, yaitu tujuan. Karena itu, apa pun bentuknya, semua bagian dalam sistem hukum Islam disusun agar bisa mengantarkan manusia pada tujuan utama: kemaslahatan dan keadilan.¹⁰³ Dalam konteks penanganan nikah siri, pendekatan yang berorientasi pada tujuan syariat ini sangat penting. Salah satu tujuan penting dari pencatatan pernikahan secara resmi adalah untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap istri dan anak, serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.

Prinsip ini tercermin dalam praktik yang dijalankan oleh kepala KUA Gambut. Dalam salah satu kasus yang ditangani, ditemukan pasangan yang sebelumnya menikah secara siri karena merasa proses pernikahan resmi di KUA terlalu merepotkan. Setelah beberapa tahun, hubungan mereka berakhir dan salah satu pihak ingin melangsungkan pernikahan baru secara sah. Namun, karena pernikahan sebelumnya tidak pernah dicatatkan, tidak tersedia dokumen resmi perceraian yang menjadi syarat untuk menikah kembali secara hukum.

Menanggapi situasi ini, kepala KUA Gambut memberikan arahan agar pasangan tersebut mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus perceraian

¹⁰³ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, h. 169.

ke Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar status pernikahan sebelumnya diakui secara hukum, dan perceraian dapat dicatat secara sah. Selain itu, karena pasangan ini telah memiliki anak, Pengadilan juga dapat menetapkan asal-usul anak agar hak-hak perdata anak seperti akta kelahiran dan hak waris, dapat dijamin secara hukum.

Menurut penulis, langkah ini menunjukkan bahwa KUA Gambut tidak hanya fokus pada aspek pencatatan pernikahan, tetapi juga berupaya memastikan bahwa tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, benar-benar tercapai. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Juga sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi martabat keluarga (*hifz al-ird*), sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip dasar *maqâsid al-syarî'ah*.

Kebijakan yang diambil oleh kepala KUA Gambut memperlihatkan bahwa penyelesaian nikah siri yang diikuti oleh perceraian tidak cukup dengan akad ulang, melainkan memerlukan jalur formal yang legal melalui Pengadilan Agama. Hal ini penting agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat dipenuhi secara menyeluruh, sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum negara bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* dari Jasser Auda tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga bersifat aplikatif dan operasional dalam menghadapi realitas sosial keagamaan, khususnya dalam menyikapi fenomena nikah siri. Dengan menerapkan enam prinsip sistem yang dikembangkan Jasser Auda yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hirarki, multidimensionalitas, dan kebertujuan. Kepala KUA di Kabupaten Banjar mampu mengambil kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap masalah dan kebutuhan pada masyarakat. Setiap keputusan tidak diposisikan sebagai penerapan hukum yang kaku, melainkan sebagai bagian dari ijtihad kelembagaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga, memperkuat integritas keluarga, serta menjaga ketertiban sosial melalui pendekatan yang solutif dan berkeadilan.

Pendekatan ini pada hakikatnya merupakan aktualisasi dari nilai-nilai utama syariat Islam, yaitu menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharûriyyât al-khams*). Dalam konteks penyelesaian nikah siri, tiga di antaranya tampak sangat dominan, yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-ird* (menjaga kehormatan dan martabat keluarga), serta *hifz al-dîn* (menjaga agama).¹⁰⁴ Langkah-langkah seperti *tajdid nikah* atau isbat nikah bukan sekadar solusi administratif, tetapi merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan *maqâsid al-syarî'ah* secara kontekstual.

¹⁰⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 43.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan sistem hukum negara. Pendekatan ini menyatukan semangat syariah dengan kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meski hukum negara menekankan pentingnya pencatatan pernikahan, realitas sosial menunjukkan banyak hambatan dalam pemenuhannya. Dalam situasi seperti ini, prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah* memberikan ruang adaptasi hukum yang tetap menjaga tujuan syariat. Maka, penyelesaian nikah siri berbasis *maqâsid al-syarî'ah* tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem nasional.

Penerapan pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* oleh beberapa kepala KUA di Kabupaten Banjar juga selaras dengan sejumlah kaidah fikih klasik yang telah lama menjadi fondasi dalam praktik hukum Islam. Di antaranya adalah kaidah **الضرورات تبيح المحظورات** (*al-darûrât tubîhu al-mahzûrât*).¹⁰⁵ Kaidah ini relevan dalam konteks pemberian alternatif seperti *tajdid nikah* bagi pasangan nikah siri yang tidak dapat mengakses proses isbat nikah karena kendala ekonomi, administratif, atau geografis. Dalam kondisi seperti itu, pengulangan akad nikah di KUA menjadi bentuk solusi syar'i demi mencegah kerugian hukum dan sosial yang lebih besar.

¹⁰⁵ Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 66.

Selain itu, kaidah **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح** (*dar' u al-mafâsid muqaddamun ala' jabil masâlih*).¹⁰⁶ Kaidah ini juga tampak dalam kebijakan beberapa kepala KUA yang memilih memberikan solusi yang cepat dan diterima masyarakat daripada membiarkan pasangan terjebak dalam situasi tanpa kepastian hukum. Misalnya, langkah untuk tidak memaksakan proses formal di Pengadilan Agama dalam situasi yang tidak memungkinkan justru dapat mencegah munculnya konflik keluarga, status anak yang tidak jelas, atau pasangan yang dikucilkan secara sosial.

Dengan demikian, menurut penulis kebijakan seperti *tajdid nikah* dan isbat nikah yang diterapkan oleh kepala KUA di Kabupaten Banjar bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari penerapan *maqâsid al-syari'ah* yang berpadu dengan kaidah-kaidah fikih. Pendekatan ini berhasil menyeimbangkan nilai-nilai agama, kepentingan sosial, dan kepastian hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat solutif, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan sistem hukum negara demi tercapainya kemaslahatan umat.

2. Analisis Teori Kepastian Hukum

Setelah sebelumnya dianalisis melalui pendekatan *maqâsid al-syari'ah* Jasser Auda yang menekankan pentingnya kemaslahatan, keterbukaan, integrasi, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam, maka pada bagian ini penulis akan mengkaji penanganan kasus nikah siri melalui perspektif teori

¹⁰⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 84.

kepastian hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh KUA mampu memberikan perlindungan hukum yang pasti, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam suatu sistem hukum, karena menyangkut kejelasan aturan, keteraturan dalam pelaksanaannya, serta perlindungan terhadap hak-hak hukum warga negara. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menuntut agar hukum dapat dipahami secara jelas, ditegakkan secara konsisten dan memberikan prediktabilitas terhadap akibat hukum dari setiap tindakan.¹⁰⁷

Dalam konteks pernikahan, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan pencatatan pernikahan sebagai bentuk legalitas formal yang diakui oleh negara. Pencatatan ini menjadi instrumen utama untuk menjamin hak-hak hukum pasangan suami istri, termasuk hak waris, hak atas nafkah, hak asuh anak, hingga akses terhadap pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya. Tanpa pencatatan, pernikahan hanya sah secara agama tetapi kehilangan kekuatan hukum formal, sehingga istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan sosial.

Fenomena nikah siri yang terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Banjar menunjukkan adanya ketegangan antara realitas sosial-keagamaan masyarakat dan tuntutan hukum positif yang mensyaratkan pencatatan

¹⁰⁷ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 45.

sebagai syarat legalitas pernikahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Martapura, Gambut, Astambul, Mataraman, dan Karang Intan, ditemukan bahwa penyebab utama praktik nikah siri adalah karena kendala biaya, ketidaktahuan terhadap regulasi, serta pengaruh budaya lokal yang masih menganggap bahwa akad nikah secara agama sudah cukup tanpa perlu pencatatan negara.

Dalam praktiknya, penyelesaian nikah siri oleh KUA dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu: (1) Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama bagi mereka yang telah menikah secara siri dan ingin melegalkan pernikahan mereka secara hukum negara dan (2) Pelaksanaan *tajdid nikah* (pembaharuan akad nikah) disertai pencatatan resmi oleh KUA. Namun demikian, hambatan masih sering muncul, seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme yang tersedia, keterbatasan biaya untuk mengakses Pengadilan Agama, serta ketidakmauan untuk menempuh proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu.

Ketiadaan pencatatan pernikahan tidak hanya berdampak pada status hukum suami istri, tetapi juga mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak. Anak dari pernikahan siri berisiko mengalami diskriminasi hukum, terutama dalam hal pencatatan kelahiran, akses pendidikan, waris dan perlindungan hukum lainnya. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya penting untuk mengesahkan pernikahan, tetapi juga berperan melindungi hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara normatif, ketentuan mengenai kepastian hukum dalam urusan pernikahan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.¹⁰⁸ Ketentuan ini menempatkan pencatatan sebagai syarat pembuktian yang sah di mata hukum negara. Lebih lanjut, Pasal 19 PMA Nomor 30 Tahun 2024 menyatakan bahwa pencatatan nikah hanya dapat dilakukan apabila pelaksanaan akad nikah berlangsung secara sah dan disaksikan oleh petugas resmi.¹⁰⁹ Dengan demikian, hukum positif telah memberikan kerangka legal yang jelas sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum dalam pernikahan.

Di lapangan, pendekatan kepastian hukum terhadap nikah siri mulai terlihat melalui dua cara, yaitu isbat nikah (penetapan nikah oleh Pengadilan Agama) dan *tajdid nikah* (nikah ulang di KUA). Meski kedua cara ini tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang sebagai solusi utama untuk nikah siri, namun dalam praktiknya telah berkembang menjadi langkah administratif dan hukum yang dianggap mampu menghubungkan antara aturan resmi dan kenyataan di masyarakat. Meski begitu, pelaksanaan

¹⁰⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, h. 7.

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

pendekatan ini berbeda-beda di tiap KUA, tergantung pada kondisi kasus dan kebijakan masing-masing kantor.

Pendekatan KUA Astambul dalam menangani kasus nikah siri menunjukkan implementasi kepastian hukum yang bersifat responsif. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika usia perempuan saat menikah masih di bawah ketentuan hukum positif, KUA tidak menyarankan jalur isbat nikah karena berpotensi ditolak oleh Pengadilan Agama. Sebagai alternatif, KUA memberikan opsi *tajdid nikah* atau pernikahan ulang di KUA, dengan catatan data kependudukan tidak bermasalah. Meskipun *tajdid nikah* belum memiliki landasan hukum yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan ini tetap mencerminkan bentuk perlindungan hukum substantif terhadap hak pasangan untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya. Pendekatan fleksibel ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum harus berjalan berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan.¹¹⁰

KUA Mataraman, cara penyelesaian kasus disesuaikan dengan dokumen dan apakah pasangan sudah punya anak. Jika sudah punya anak atau dokumen menunjukkan status “kawin”, maka disarankan isbat nikah. Namun jika belum menikah secara hukum dan belum punya anak, *tajdid nikah* diperbolehkan. Kepala KUA Mataraman juga menyarankan agar pelaku nikah siri dikenakan sanksi hukum, dan masyarakat perlu diberi pemahaman hukum melalui sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya

¹¹⁰ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 45.

untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mencegah masalah lewat edukasi.

KUA Karang Intan, pendekatan yang digunakan menekankan kepastian hukum administratif, yakni dengan melihat status dalam KTP dan Kartu Keluarga. Jika status “belum kawin” dan pasangan belum memiliki anak atau belum berada dalam satu Kartu Keluarga, maka dilakukan *tajdid nikah*. Sebaliknya, jika sudah tercatat sebagai “kawin” atau telah memiliki anak, maka isbat nikah menjadi langkah yang diprioritaskan. Kepala KUA setempat menyoroti pentingnya regulasi nasional terkait *tajdid nikah* agar ada kepastian hukum yang lebih tegas dan seragam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat praktik administratif di lapangan, tetap diperlukan kepastian hukum normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang eksplisit guna mencegah tafsir beragam di berbagai wilayah.

KUA Martapura mengambil langkah awal dengan memeriksa kesesuaian antara status kependudukan dan status hukum pasangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka diminta surat keterangan dari desa sebagai dasar koreksi data. Bagi pasangan yang telah memiliki anak, diarahkan untuk mengajukan isbat nikah, sementara *tajdid nikah* dipilih bagi mereka yang masih memenuhi persyaratan administratif. Pandangan menarik dari kepala KUA Martapura adalah usulan untuk menurunkan kembali usia minimum kawin perempuan ke 16 tahun dengan pertimbangan kontekstual, seperti kasus kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Meskipun usulan ini menimbulkan perdebatan, hal tersebut menunjukkan bahwa KUA juga

mempertimbangkan bentuk kepastian hukum yang bersifat substantif yakni hukum yang merespons kebutuhan sosial dan realitas masyarakat. Selain itu, kepala KUA menekankan pentingnya sinergi antara KUA, Pengadilan Agama, dan Dukcapil agar legalisasi pernikahan tidak terhambat oleh ketidakterpaduan data.

KUA Gambut, pendekatan penyelesaian nikah siri hampir serupa, yakni dengan mempertimbangkan status anak dan pencatatan dalam dokumen. Akan tetapi, kepala KUA Gambut memberikan catatan kritis terhadap praktik isbat nikah massal yang dikhawatirkan justru memicu masyarakat melakukan nikah siri terlebih dahulu dengan keyakinan akan bisa dilegalkan kemudian. Oleh karena itu, kepala KUA Gambut menekankan pentingnya pendekatan edukatif sejak dini melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya dilihat dari aspek prosedural formal, tetapi juga dari pembinaan moral dan sosial masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela.

Sementara itu, KUA Simpang Empat menerapkan pendekatan verifikatif menyeluruh dalam menangani kasus nikah siri, mulai dari tabayyun atas laporan masyarakat, validasi surat, hingga dokumentasi visual. Jalur isbat nikah disarankan bagi pasangan yang telah memiliki anak, sementara *tajdid nikah* menjadi pilihan bagi pasangan yang masih memenuhi syarat formal. Kepala KUA Simpang Empat mengusulkan pentingnya perumusan SOP nasional sebagai standar prosedural dalam penanganan nikah

siri serta regulasi yang komprehensif terkait sanksi administratif. Selain itu, beliau mendorong integrasi nilai-nilai *maqâsid al-syarî'ah* dalam pendidikan hukum masyarakat melalui pengajian agama, khutbah, dan kerja sama lintas sektor. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum sebaiknya tidak hanya mengandalkan aturan tertulis, tapi juga menyentuh sisi keagamaan dan sosial masyarakat.

3. Analisis Perspektif Kepala KUA Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam kepala KUA di Kabupaten Banjar, fenomena nikah siri menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait kepastian hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kepala Kantor Urusan Agama memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dinilai strategis untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan nikah siri.

Pertama, pembebasan biaya dan penyederhanaan prosedur isbat nikah menjadi langkah prioritas karena hambatan finansial dan prosedural terbukti menjadi alasan utama pasangan enggan melegalkan pernikahannya. Dalam teori sistem Jasser Auda, kebijakan ini mencerminkan kebertujuan (*purposefulness*) hukum Islam yang selaras dengan *maqâsid al-syarî'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan). Aspek keterbukaan (*openness*) terlihat dari kemampuan sistem hukum untuk merespons realitas sosial-ekonomi masyarakat, sementara keutuhan (*wholeness*) tercermin dalam harmonisasi norma syariah dan hukum positif, seperti Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pencatatan perkawinan.¹¹¹ Dengan demikian, kebijakan pembebasan biaya dan penyederhanaan prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama diharapkan dapat menghapus hambatan administratif dan finansial, sehingga pasangan nikah siri terdorong untuk melegalkan perkawinannya demi kepastian hukum, perlindungan hak, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kedua, penyusunan regulasi nasional tentang *tajdid nikah* (pembaruan akad nikah) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas praktik yang saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia. Praktik *tajdid nikah* terkadang dilakukan masyarakat yang telah menikah siri sebagai cara memperoleh legalitas di KUA tanpa melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Menurut perspektif Jasser Auda, langkah ini mencerminkan keterbukaan hukum yang adaptif terhadap praktik sosial, sekaligus hierarki keterkaitan (*interrelated hierarchy*) karena menempatkan kepastian nasab dan status hukum sebagai prioritas (*daruriyyat*) dibanding kepentingan sekunder (*hajiyyat* atau *tahsiniyyat*). Dalam hukum Islam, *tajdid nikah* sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, namun hukum positif Indonesia, melalui Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, mengharuskan penetapan Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah terjadi sebelumnya.¹¹² Regulasi yang jelas akan menghindari potensi sengketa

¹¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, h. 7.

hukum, meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta memastikan sinergi antara *maqâsid al-syarî'ah* dan aturan negara.

Ketiga, penerapan sanksi administratif yang bersifat edukatif terhadap pelaku nikah siri merupakan pendekatan yang mengedepankan pembinaan daripada penghukuman. Menurut perspektif Jasser Auda, hal ini mencerminkan sifat kognitif (*cognitive nature*) yang memandang hukum sebagai sarana pembelajaran dan transformasi perilaku. Sanksi edukatif, seperti kewajiban mengikuti bimbingan pranikah, pelatihan keluarga sakinah, atau penyuluhan hukum, dapat memperkuat keutuhan sistem hukum dengan mengintegrasikan peran KUA, penyuluh agama, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Dari sudut *maqâsid al-syarî'ah*, kebijakan ini selaras dengan amar ma'ruf nahi munkar serta bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-ird*), sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Keempat, penguatan literasi hukum berbasis komunitas menjadi strategi yang berfokus pada penyadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan risiko nikah siri. Dalam perspektif Jasser Auda, kebijakan ini mencerminkan sifat kognitif karena mendorong pemahaman hukum yang mendalam, keterbukaan dalam penyesuaian metode penyuluhan dengan konteks lokal, dan multidimensionalitas (*multidimensionality*) karena menggabungkan dimensi agama, hukum, sosial, dan budaya. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep tabligh dan ta'lim dalam Islam, serta *maqâsid al-syarî'ah*, khususnya *hifz al-dîn* (menjaga

agama) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, literasi hukum dapat dibangun secara partisipatif sehingga kesadaran hukum menjadi bagian dari budaya lokal.

Secara keseluruhan, empat rekomendasi ini tidak hanya menjawab persoalan administratif nikah siri, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem hukum Islam yang dianalisis melalui lensa Jasser Auda mampu menghadirkan solusi yang utuh (*wholeness*), terbuka (*openness*), multidimensional, memiliki hierarki keterkaitan yang jelas, bersifat kognitif, dan berorientasi tujuan (*purposefulness*). Sinergi antara *maqâsid al-syarî'ah* dan hukum positif memungkinkan tercapainya perlindungan maksimal terhadap hak-hak perempuan dan anak, menjaga ketertiban sosial, serta memastikan legalitas perkawinan sebagai bagian dari kemaslahatan publik (*maslahah ammah*).

Dari berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelesaian nikah siri tidak cukup hanya berpegang pada aturan hukum yang tertulis. Seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya, kepastian hukum memang penting, tetapi hukum juga harus mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan.¹¹³ Artinya, hukum yang terlalu kaku dan hanya mengejar kepastian formal bisa jadi tidak adil bagi masyarakat. Dalam konteks penanganan nikah siri di Kabupaten Banjar, pendekatan yang fleksibel seperti *tajdid nikah*, penyesuaian prosedur berdasarkan kondisi

¹¹³ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 45.

pasangan, serta kerja sama antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan Dinas Dukcapil merupakan contoh nyata penerapan hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat. Dengan cara ini, hukum benar-benar bisa melindungi hak-hak masyarakat, terutama perempuan dan anak, serta menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, penulis sependapat dengan pendekatan yang dilakukan oleh kepala KUA di Kabupaten Banjar dalam menangani kasus-kasus nikah siri. Setiap KUA menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang tidak hanya sesuai dengan prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan administratif pasangan. Opsi *tajdid nikah* yang diberikan dalam kondisi tertentu, terutama ketika isbat nikah berpotensi ditolak, adalah bentuk kepastian hukum yang bersifat adaptif dan solutif. Pendekatan ini tidak kaku, tetapi tetap bertanggung jawab secara hukum dan memberi perlindungan terhadap hak-hak pasangan. Selain itu, usulan-usulan seperti perlunya regulasi nasional tentang *tajdid nikah*, pembebasan biaya isbat nikah dan penyederhanaan prosedurnya, hingga pentingnya edukasi hukum di masyarakat melalui kolaborasi antar lembaga, mencerminkan pemikiran yang progresif dan berpihak pada kepastian hukum yang berkeadilan.

Namun demikian, penulis tidak sependapat dengan usulan kepala KUA Martapura yang menghendaki penurunan usia minimal kawin perempuan menjadi 16 tahun, meskipun alasannya kontekstual dan berdasarkan kondisi sosial tertentu. Secara hukum, usulan tersebut bertentangan dengan ketentuan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan upaya mencegah perkawinan anak. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 juga mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang harus mencapai usia matang secara jasmani dan rohani.¹¹⁴

Maka dari itu, usulan penurunan usia tersebut dapat membuka ruang terhadap praktik pernikahan anak yang bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum, serta tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendukung pencegahan perkawinan di usia dini. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa strategi-strategi penyelesaian nikah siri yang diterapkan oleh beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar, selain usulan terkait usia kawin tersebut, tetap layak dijadikan model dalam perumusan kebijakan penanganan nikah siri dalam lingkup regional maupun nasional.

¹¹⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, h. 9.